

**RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2025. Renja merupakan dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode satu tahun.

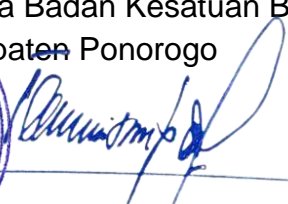
Rencana Kerja (RENJA) ini memuat target capaian RENJA tahun 2025, evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2024 dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, *review* terhadap perencanaan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Kami berharap Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo tahun 2025 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo.



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 196805121990092002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah (Format A).....	5
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Format B)	12
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Format C)	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Format D).....	35
BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	42
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3 Program dan Kegiatan (Format E).....	43
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	56
BAB V Penutup	69



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Aloon-Aloon Utara Nomor 6, Telepon (0352) 483 852,
Faksimile (0352) 483 852, Kode Pos (63413),

Website: [https:// bakesbangpol.ponorogo.go.id/](https://bakesbangpol.ponorogo.go.id/), Email: bakesbangpol_po@yahoo.com

P O N O R O G O

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR: 188.45/04/405.28/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dengan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 adalah Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

Pasal 2

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (**Format A**)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (**Format B**)
- 2.3 Isu – isu penting pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (**Format C**)
- 2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD (**Format D**)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan (**Format E**)

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Pasal 5

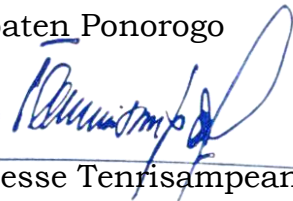
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal, 1 Agustus 2024



Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Ponorogo


Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 196805121990092002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja SKPD tahun 2023 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Ponorogo.

Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra dan RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2025 didasarkan oleh alasan sebagai berikut :

1. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2025 masih berpedoman kepada Permendagri Nomor : 18 Tahun 2021 dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2025 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No . 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Kinerja;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah menyediakan arah acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang penyusunan Renja
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas program dan kegiatan berdampak kepada penapaian indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Renstra dan telah diperjanjikan didalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Pengukuran dilakukan terhadap indikator program maupun kegiatan tahun berjalan, tahun sebelumnya serta proyeksi tahun yang akan datang secara keseluruhan kami tuangkan ke dalam Format A.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Ponorogo	86				
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Pilpres Dan Pileg	0%				
					Prosentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui	75%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik								
8	1	3	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8	1	3	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemeliharaan Umum/ Pemeliharaan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi							
8	1 4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas dan LSM yang Aktif	25 %	45 %	50%	50%	100%	45%	-
8	1 4 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terselenggaranya Kegiatan dan Monitoring Terkait Ormas dan LSM di Kabupaten							
8	1 4 2.01 3	Pelaksanaan Koordinasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	1	5								
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,28					
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Frekuensi penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama				
8	1	5	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
8	1	5	2.02	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
		Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									
8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi konflik yang ditindaklanjuti 1x24 jam						
8	1	6	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (n-3)	Terget Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Intelijen Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024, adapun hasilnya sebagaimana tertuang ke dalam Format B.

Format B

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo**

No.	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Prangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jumlah Kejahatan / Kriminalitas	-	-	265 Kasus	260 Kasus	255 Kasus	250 Kasus	251 Kasus	-	255 Kasus	250 Kasus	
2.	Prosentase Konflik yang dapat Diredam	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
3.	Tingkat Partisipasi Politik											
	a. PILPRES	-	-	-	78%	-	-	-	-	-	-	
	b. PILEG	-	-	-	78%	-	-	-	-	-	-	
	c. PILGUB	-	-	-	77%	-	-	-	-	-	-	
	d. PILBUP	-	-	-	77%	-	-	-	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan masalah yang saling berhubungan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

1. Konflik ekonomi sebagai akibat dari kemajuan teknologi;
2. Konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan;
3. Konflik antar etnis;

A. Permasalahan.

- ❖ Terkait dengan sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga keamanan dan ketenteraman di masyarakat akan tercapai.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

1. Adanya konflik keagamaan yang disebabkan oleh dinamisasi aliran dalam kehidupan beragama dan aliran kepercayaan ;
2. Konflik yang terjadi karena adanya gesekan antar perguruan silat dan bela diri yang ada di Kabupaten Ponorogo ;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya wawasan kebangsaan mengingat semakin kompleksnya persoalan yang ada dalam keberagaman masyarakat ;

- ❖ Sasaran Strategis kedua yaitu : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga partisipasi masyarakat dalam politik akan meningkat.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan dalam hal pendirian ORMAS dan LSM.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

B. Hambatan.

Hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo ke depan dalam upaya meningkatkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Faktor geografis yang luas sehingga jangkauan dalam pengawasan kepada warga masyarakat terbatas ;
2. Kesadaran warga masyarakat dalam partisipasi politik masih rendah.

2.4 Review terhadap Perencanaan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawali program / kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rancangan awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Keselarasan Program dan Kegiatan nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam dokumen rencana kerja memuat informasi rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 di dasarkan pada RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD)

Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan Program serta Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Selanjutnya identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan di konsolidasikan dengan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan RKA SKPD sebagaimana tersebut dalam Format C.

Format C

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	3.829.140.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	3.829.140.300	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.974.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan administasi Perkantoran, Daya Dukung asset terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.974.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.235.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.235.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kel/Desa				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.739.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.739.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	3.217.237.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaram Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.217.237.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.117.416.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.117.416.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Semua Kel/Desa				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	94.082.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	92.082.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.739.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.739.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	162.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	162.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas	Kab. Ponorogo,	Jumlah Paket	28 Paket	9.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas	Kab.	Jumlah Paket	28 Paket	9.800.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			beserta Atribut Kelengkapannya	Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	152.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	152.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	251.008.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	251.008.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.196.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.196.100	
	Penyediaan Peralatan dan	Kab. Ponorogo,	Jumlah Paket	2 Paket	19.500.000	Penyediaan Peralatan dan	Kab.	Jumlah Paket	2 Paket	19.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Perlengkapan Kantor	Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.373.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.373.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.108.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.108.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	16.810.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	16.810.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	82.020.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	82.020.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset	100%	46.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset	100%	46.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah					Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset	100%	130.921.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administasi Perkantoran, Daya Dukung Asset	100%	130.921.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah					Terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	119.921.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	119.921.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	6.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan,	Prosentase Pelaksanaan Penguatan	75%	465.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kab. Ponorogo, Semua	Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi	75%	465.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Semua Kel/Desa	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	465.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Kebangsaan	75%	465.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	65.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	65.000.000	
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	70 Orang	400.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	70 Orang	400.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN	Kab. Ponorogo,	Indeks Demokrasi	86 Angka	1.693.532.000	PROGRAM PENINGKATAN	Kab.	Indeks Demokrasi	86 Angka	1.693.532.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indonesia Kabupaten Ponorogo			PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Indonesia Kabupaten Ponorogo			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Pilpres Dan Pileg Prosentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	0% 75%	1.693.532.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Pilpres Dan Pileg Prosentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	0% 75%	1.693.532.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di	Kab. Ponorogo,	Jumlah Orang	10 Orang	1.655.532.000	Pelaksanaan Kebijakan di	Kab.	Jumlah Orang yang	10 Orang	1.655.532.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	10 Orang	35.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	10 Orang	35.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	5 Laporan	3.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan	3.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Situasi Politik di Daerah								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang Aktif	45 %	78.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang Aktif	45 %	78.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselenggaranya Kegiatan dan Monitoring Terkait Ormas dan LSM di Kabupaten	1 Kegiatan	78.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terselenggaranya Kegiatan dan Monitoring Terkait Ormas dan LSM di Kabupaten	1 Kegiatan	78.000.000	
	Pelaksanaan kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	50.000.000	Pelaksanaan kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemsyarakatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di	Kab. Ponorogo,	Jumlah Orang	50 Orang	25.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di	Kab.	Jumlah Orang yang	50 Orang	25.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan	3.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan	3.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan,	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,28 Angka	170.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,	Kab. Ponorogo, Semua	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,28 Angka	170.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SOSIAL, DAN BUDAYA	Semua Kel/Desa				SOSIAL, DAN BUDAYA	Kecamatan, Semua Kel/Desa				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Frekuensi penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 kali	170.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Frekuensi penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 kali	170.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan	100 Orang	70.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan	100 Orang	70.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kel/Desa	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Laporan	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Potensi Konflik yang dapat diredam	100%	2.661.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Potensi Konflik yang dapat diredam	100%	2.661.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Potensi konflik yang ditindaklanjuti 1x24 jam	100%	2.661.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Prosentase Potensi konflik yang ditindaklanjuti 1x24 jam	100%	2.661.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	100 Orang	1.400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	100 Orang	1.400.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	100.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	5 Orang	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	5 Orang	5.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	1.156.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dokumen	1.156.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 167 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo maka untuk perencanaan program dan kegiatan tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas, utamanya terkait dengan terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Berikut Format D yang menyajikan data usulan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Format D**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Ponorogo**

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Ponorogo, Semua	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	28 Paket	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kelengkapannya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelengkapan		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28 Orang	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
8.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	25 Orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kebangsaan		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	70 Orang	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
9.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	5 Laporan	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
10.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Orang	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
11.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	5 Orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
12.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	20 Orang	

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Orang	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Usaha-usaha yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang hendak dicapai, diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Selain itu keamanan dan ketentraman yang merupakan salah satu pendukung tercapainya pola pembangunan di suatu wilayah / daerah adalah menjadi prioritas utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo guna mendukung tercapainya keseluruhan program-program Bupati dan Wakil Bupati dalam periode 5 tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai unit pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibutuhkan dan perlu ditetapkan strategi kebijakan program dan kegiatan. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi dengan Suprastruktur politik dan infrastruktur politik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimda dan Dinas terkait dalam upaya untuk deteksi dini dan cegah dini untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Dalam rangka mewujudkan kebijakannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tujuan, sasaran dan beberapa program yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan dimana pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025.

a) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari

pada misi. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

“Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan situasi keamanan yang kondusif“

Dengan indikator : Prosentase kejadian terkait Poleksosbud yang dapat dicegah

b) Sasaran.

Adapun sasaran yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :

1. “Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat“.

Indikator sasaran :

1. Jumlah Kejahatan / Jumlah Kriminalitas
2. Prosentase potensi konflik yang dapat diredam

2. “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik“

Indikator sasaran :

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik:
 - Pilpres
 - Pilgub
 - Pilbup
 - Pileg

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

“Meningkatnya rasa aman dan tenteram di masyarakat“

Sasaran tersebut dicapai dengan 3 Program , 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud adalah :

I. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.

II. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukuan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
 - 1.1. Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah .
 - 1.2. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2 :

“Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik“

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 Program, 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah :

- I. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
 1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.

- 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
- II. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- III. Program-program penunjang yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo adalah :
- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
 - 1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 2.3. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD.
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
 - 3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- 4.3. Penyediaan Peralatan rumah Tangga.
- 4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 4.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.
- 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Pengadaan Mebel.
 - 5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 7.3. Pemeliharaan Mebel.
 - 7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.739.000	APBD		1 Laporan	7.000.000
8	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.217.237.000	APBD			3.002.000.000
8	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Orang/bulan	3.117.416.000	APBD		23 Orang/bulan	2.900.000.000
8	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	94.082.000	APBD		12 Dokumen	7.000.000
8	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.739.000	APBD		1 Laporan	3.930.000
8	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				162.000.000	APBD			191.200.000
8	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Paket	9.800.000	APBD		28 Paket	11.200.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Orang	152.200.000	APBD		1 Orang	180.000.000
8	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				251.008.300	APBD			245.196.100
8	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	6.196.100	APBD		1 Paket	6.196.100
8	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	19.500.000	APBD		2 Paket	15.000.000
8	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	2.000.000
8	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	92.373.200	APBD		1 Paket	100.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	14.108.500	APBD		1 Paket	15.000.000
8	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	16.810.000	APBD		12 Dokumen	17.000.000
8	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	82.020.500	APBD		48 Laporan	90.000.000
8	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000	APBD			15.000.000
8	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
8	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.000.000	APBD			53.000.000
8	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4.000.000	APBD		2 Laporan	4.500.000
8	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12.000.000	APBD		12 Laporan	12.500.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	30.000.000	APBD		12 Laporan	36.000.000
8	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.921.000	APBD			146.500.000
8	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	119.921.000	APBD		3 Unit	130.000.000
8	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	6.000.000	APBD		15 Unit	6.500.000
8	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.000.000	APBD		1 Unit	10.000.000
8	01	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				465.000.000	APBD			670.000.000
8	01	02	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				465.000.000	APBD			670.000.000
8	01	02	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	65.000.000	APBD			70.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	02	2	01	08	Pembentukan paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	400.000.000	APBD		70 Orang	600.000.000
8	01	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.693.532.000	APBD			1.705.032.000
8	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.693.532.000	APBD			1.705.032.000
8	01	03	2	01	0	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	1.655.532.000	APBD		10 Orang	1.652.532.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	03	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	35.000.000	APBD		50 Orang	50.000.000
8	01	03	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	3.000.000	APBD		12 Laporan	2.500.000
8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				78.000.000	APBD			78.000.000
8	01	04	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				78.000.000	APBD			78.000.000
8	01	04	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	50.000.000	APBD		10 Orang	50.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	04	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	25.000.000	APBD		50 Orang	50.000.000
8	01	04	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.000.000	APBD		1 Laporan	3.000.000
8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				125.761.000	APBD			125.761.000
8	01	05	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				125.761.000	APBD			125.761.000
8	01	05	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000	APBD		5 Orang	50.000.000
8	01	05	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	70.000.000	APBD		50 Orang	80.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	05	2	01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.661.000.000	APBD			2.261.000.000
8	01	06	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				2.661.000.000	APBD			2.661.000.000
8	01	06	2	01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	1.400.000.000	APBD		100 Orang	1.400.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	100.000.000	APBD		20 Orang	100.000.000
8	01	06	2	01	04	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5.000.000	APBD		5 Laporan	5.000.000
8	01	06	2	01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	1.156.000.000	APBD		11 Dokumen	1.156.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

No	Kode	Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah dan Peninggalan			
				Target 2025	Pagu Indikasi (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pagu Indikasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
005	01	01	PROGRAM PERUMAH KUNYAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ACFTA	Prosentase Pelaksanaan Program Perumahan Urusan Pemerintahan Daerah Keseluruhan	100 %	3.444.838.300,00			3.666.896.300,00		
01	04	01	2.05	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Terasutuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	11.504.000,00			11.000.000,00	
01	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah						
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.235.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	04	01	3.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD						
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	1 Laporan	5.735.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terasutuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.852.725.000,00			3.000.000.000,00	
01	01	01	2.01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
					Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	2.752.804.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.02	0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	94.082.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	04	01	3.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.735.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Terasutuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	162.000.000,00			151.200.000,00	
01	01	01	2.01	0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelembagaannya						
					Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelembagaan	28 Paket	9.900.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	11.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.03	0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berhubungan Tugas dan Fungsi						
					Jumlah Pegawai Berhubungan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan	28 Orang	152.200.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terasutuhnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Asset terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	251.000.000,00			245.100.000,00	
01	01	01	2.03	0001	Penyediaan Komponen Instalasi						
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadakan	1 Paket	6.156.150,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6.156.150,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.03	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	2 Paket	15.300.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.03	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Diadakan	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.04	0004	Penyediaan Mekan Logistik Kantor						
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadakan	1 Paket	52.373.200,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.03	0005	Penyediaan Ruang Cetak dan Pengabdian						
					Jumlah Paket Ruang Cetak dan Pengabdian yang Diadakan	1 Paket	14.108.500,00	Kab. Ponorego, Semua Kecamatan, Semua Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01	01	01	2.04	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Keuangan Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Uraian	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibekalkan	12 Dokumen	18.812.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	00	01	2.00	0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	01	2.07	0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Aspek terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	10.000.000,00			15.000.000,00	
	00	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diokulasi	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	01	2.08	0000	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Aspek terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	44.000.000,00			55.000.000,00	
	00	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibekalkan	12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	12.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibekalkan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	36.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	01	2.20	0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Daya Dukung Aspek terhadap Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	120.921.000,00			146.500.000,00	
	00	01	2.20	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pengasapannya	5 Unit	129.921.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	01	2.20	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Revisi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pengasapannya	15 Unit	6.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	6.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	01	2.20	0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
296	00	00			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75 %	465.000.000,00			670.000.000,00	
	00	00	2.01		Perumusan Kebijakan, Tokoh dan Peranbawaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase Masyarakat yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75 %	465.000.000,00			670.000.000,00	
	00	02	2.01	0004	Pada kawasan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Keluarga, dan lain sebagainya	Jumlah orang yang Mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Keluarga, dan lain sebagainya	25 Orang	60.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	00	02	2.01	0005	Pembudayaan Pahlawani	Jumlah Pahlawani	70 Orang	400.000.000,00	Kab. Ponorego, Semas Kecamatan, Semas Kel/Desa	DANA TRANSFER LURAH-DANA ALOKASI UMUM	600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Pemanggung Jawab
				Target 2025	Rupa Indikatif (Rp)	Unitas	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
287	01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Ponorogo	86 Angka	1.883.532.000,00			1.708.000.000,00	
	01.03.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantunan Situasi Politik	Prosentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Politik Rajasa dan Ring	75 %	1.883.532.000,00			1.708.000.000,00	
	01.03.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantunan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantunan Situasi Politik di Daerah	10 Orang	1.883.532.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1.883.532.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01.03.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantunan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantunan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	25.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantunan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Penantunan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	3.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
288	01.04	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KOMUNITAS	Prosentase Organisasi Masyarakat dan LSM yang aktif	45 %	70.000.000,00			63.000.000,00	
	01.04.2.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Terselenggaranya Kegiatan dan Monitoring Terkait Ormas dan LSM di Kabupaten	1 Kegiatan	70.000.000,00			63.000.000,00	
	01.04.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Lembaga Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Lembaga Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating di Daerah	10 Orang	90.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01.04.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Lembaga Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Lembaga Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating di Daerah	50 Orang	25.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Lembaga Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Lembaga Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ating di Daerah	3 Laporan	3.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Unitas / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkit Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2025	Pagu Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Efektif (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan, Otonomi, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Kegiatan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Jaring di Daerah	5 Laporan	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/ Desa	DANA TRANSFER LULU M-DANA ALOKASI UMUM	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
395	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Umat Beragama (IKUB)	78,26 Angka			236.000.000,00				
	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prakarsa Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama	1 Kali		170.000.000,00				
	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Raya, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Raya, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Orang	50.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Ke/ Desa	DANA TRANSFER LULU M-DANA ALOKASI UMUM	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Raya, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Raya, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	75.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Ke/ Desa	DANA TRANSFER LULU M-DANA ALOKASI UMUM	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Raya, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Peringatan Hari Raya, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Ke/ Desa	DANA TRANSFER LULU M-DANA ALOKASI UMUM	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
400	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang Dapat Diredam	100 %			2.261.000.980,00				
	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik yang Dapat Diredam	100 %		2.261.000.980,00				
	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	2.250.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Ke/ Desa	DANA TRANSFER LULU M-DANA ALOKASI UMUM	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	100.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Ke/ Desa	DANA TRANSFER LULU M-DANA ALOKASI UMUM	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta						

No	Kode	Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2023	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kawasan Desa, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pemangiran Koefisi di Daerah	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Rd/Desa	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI URUM	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	8036	Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota					
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota	11 Dokumen	1.156.000.000,00	Kab. Ponorogo, Semua Kecamatan, Semua Rd/Desa	DANA TRANSFER URUM-DANA ALOKASI URUM	1.156.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
				J U M L A H	2.342.005.243.608,75			2.451.524.995.190,00		

BAB V PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2025.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana program ini pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya pada bidang politik dan keamanan di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya yang bersifat dinamis, sepanjang proses pembangan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan berdaya guna serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah program dan kegiatan serta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu:
 1. Renja merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol
 2. Bakesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
 3. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat didalamnya
- c. Rencana Tindak Lanjut
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2025, Bakesbangpol berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta implimentasi dokumen Renja Bakesbangpol Tahun 2025.

Ponorogo, 1 Agustus 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ponorogo



Besse Tenrisampeang
Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.
Pembina Tingkat I

NIP 196805121990092002